SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 46J TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMALAKA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : Bahwa Dalam Rangka Menjamin Keterkaitan Konsistensi Antara Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Serta Untuk Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Strategis Kecamatan Cimalaka Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMALAKA TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
6. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
7. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
8. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Rencana Strategis Kecamatan Cimalaka Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
(2) Rencana Strategis Kecamatan Cimalaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3...

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Cimalaka Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Gambaran Pelayanan Kecamatan Cimalaka;
c. BAB III Permasalahan dan isu Strategis Kecamatan Cimalaka;
d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai uraian Rencana Strategis Kecamatan Cimalaka Tahun 2024-206 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023 NOMOR 46J

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 46J TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMALAKA TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Kecamatan Cimalaka yang juga disingkat dengan Renstra merupakan dokumen penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya Bupati baru membutuhkan pedoman transisi sebagai acuan sampai dengan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih. Pedoman transisi ini juga siap dalam menyusun rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan atau periode wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatannya yaitu tahun 2023, menyusun dokumen :

a. Draft Rancangan RPD untuk Periode 2024-2026
   Penyusunan draft Rancangan RPJMD dilakukan secara teknokratis mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode ketiga yang selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati dalam pemilihan Bupati periode berikutnya. Penekanan dokumen teknokratik dimaksud adalah analisis capaian kinerja RPJMD lalu (minimal empat tahun pertama realisasi kinerja pembangunan), analisis kapasitas riil keuangan daerah lima tahun mendatang, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, arahan visi dan misi serta tujuan dan sasaran RPJMD. Draft Rancangan RPJMD ini menjadi bahan penyusunan Rancangan RPJMD setelah bupati terpilih dilantik.
b. RKPD Tahun 2024
   Penyusunan RKPD Tahun 2024 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode ketiga dan atau draft Rancangan RPJMD untuk periode 2024-2026 jika telah tersedia. Diharapkan, pada masa transisi pergantian Kepala Daerah tersebut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu kesinambungannya. RKPD Tahun 2024 tersebut harus menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPD Tahun 2024-2026. Selanjutnya RKPD dimaksud digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam upaya mewujudkan dan menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatanya berakhir Tahun 2023 untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026

Rancangan Renstra Kecamatan Cimalaka Tahun 2024-2026 dihasilkan melalui proses penyusunan Rancangan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Cimalaka dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra;

4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Cimalaka yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1.

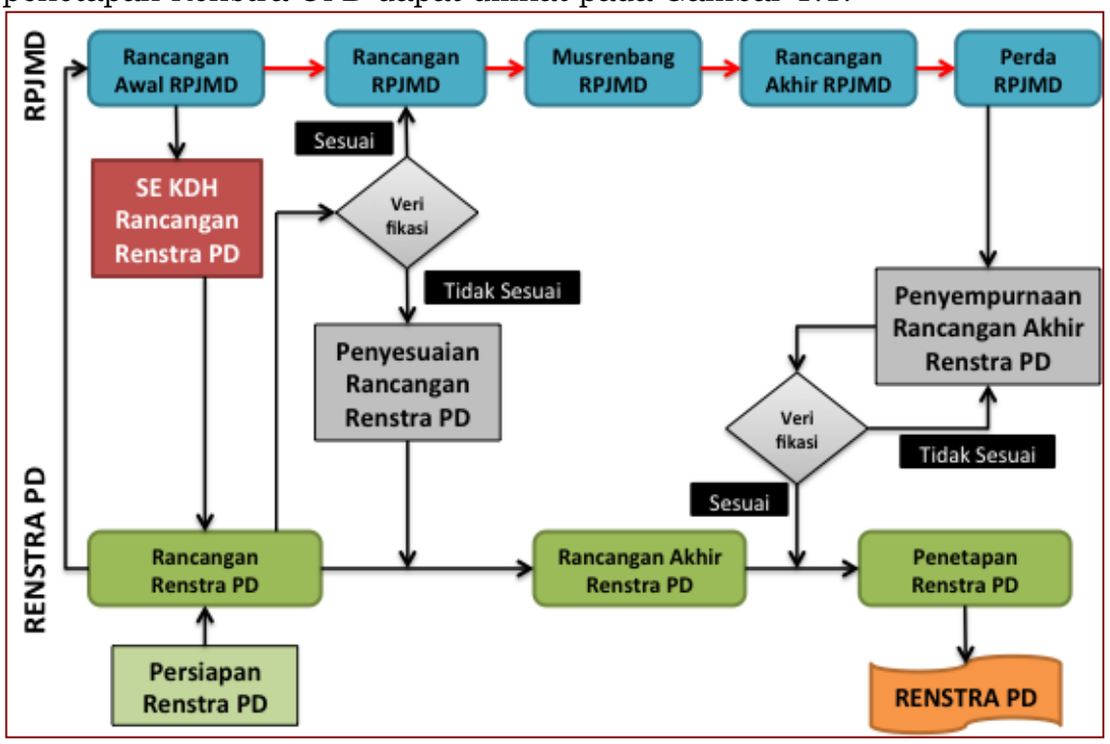

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Cimalaka Periode 2024-2026

Sumber : Permendagri 86/2017

Dengan disusunnya Rancangan Renstra Kecamatan Cimalaka Periode 2024-2026 maka Kecamatan Cimalaka diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Kecamatan Cimalaka dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Rancangan Renstra Kecamatan Cimalaka Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Cimalaka selama masa pergantian Kepala Daerah
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Cimalaka dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Cimalaka;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Cimalaka, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Cimalaka dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Cimalaka.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Cimalaka;

2.2 Sumber Daya Kecamatan Cimalaka;
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimalaka;
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cimalaka;

Bab III Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cimalaka telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra Kementrian/Lembaga dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu – isu strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Cimalaka
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.4 Penentuan Isu – isu Strategis

Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cimalaka.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cimalaka.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Cimalaka lima tahun mendatang.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

1.5. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2 1.
KETERKAITAN RESNTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINYA

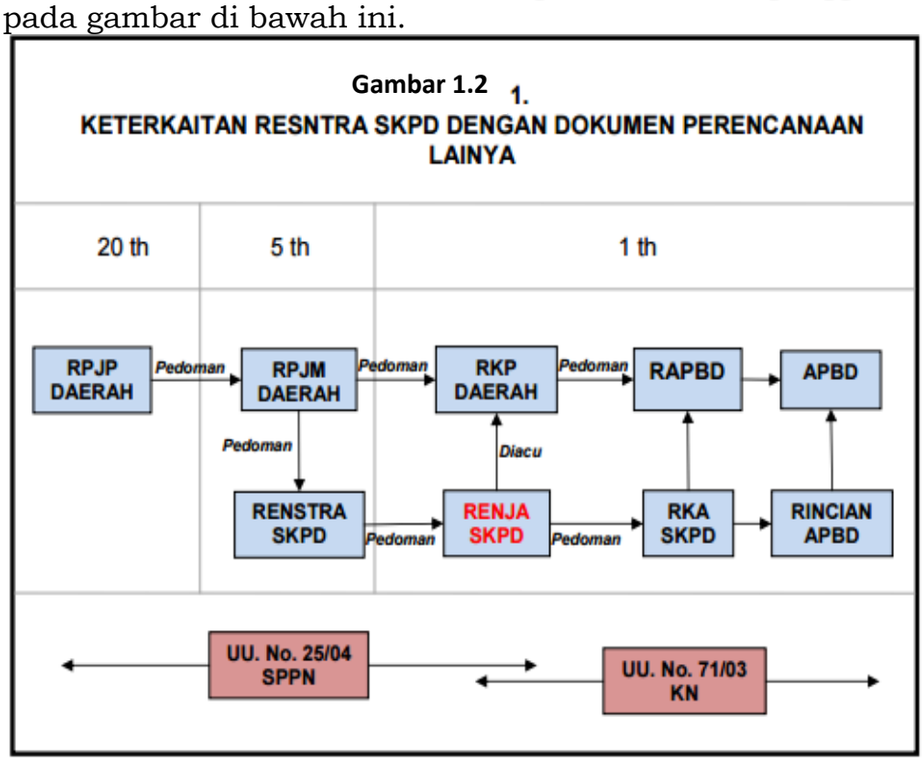

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Cimalaka tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Cimalaka akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaa kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Cimalaka dalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KECAMATAN CIMALAKA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cimalaka

Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai berikut.

2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Cimalaka

Struktur Organisasi Kecamatan Cimalaka terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
   2.1 Subag Umum;
   2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan Desa;
4. Seksi Pelayanan Publik;
5. Seksi Pemerintahan Umum;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Cimalaka sebagaimana Gambar 2.1.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN
KABUPATEN SUMEDANG

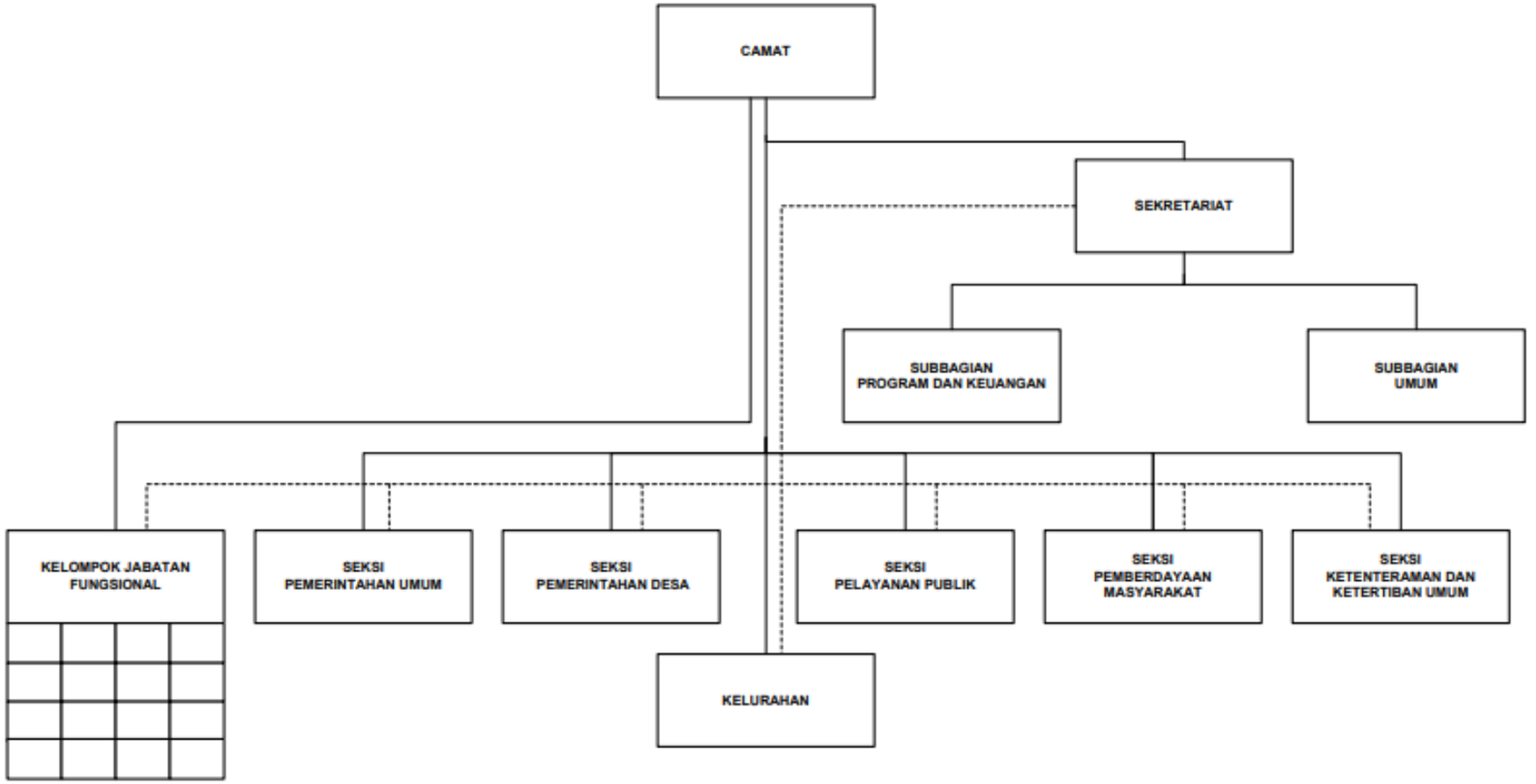

2.2 Sumber Daya Kecamatan Cimalaka

Sampai dengan Bulan Desember tahun 2022, jumlah pegawai Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sebanyak 18 orang dengan profil demografi sebagai berikut:

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Sumedang Selatan paling banyak berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 1 (satu) orang berumur 36-40 tahun, kelompok umur 31-35 sebanyak 2 (dua) orang. Sedangkan pegawai yang berumur 41-45 tahun sebanyak 5 (lima) orang, dan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) orang ada di kelompok umur 46-50. Kecamatan Sumedang Selatan tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 20-30 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	3	-	2	5
3	Seksi Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	1	2	3
4	Seksi Pelayanan Publik	-	-	-	-	1	-	2	3
5	Seksi Pemerintahan Umum	-	-	-	-	1	-	1	2
6	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	1	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1	-	-	2	3
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**1**	**5**	**2**	**10**	**18**

Sumber : Kecamatan Cimalaka Tahun 2022

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Cimalaka adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 2 orang pegawai, golongan III sebanyak 14 orang dan pegawai golongan II sebanyak 5 orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	5	-	5
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	2	-	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	2	-	3
5	Seksi Sosial	-	1	1	-	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1	-	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	2	1	-	3
TOTAL		**-**	**5**	**12**	**1**	**18**

Sumber : Kecamatan Cimalaka Tahun 2022

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Cimalaka adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA sejumlah 6 orang (33,33%), S1 sebanyak 8 orang (44,44%), S2 sebanyak 2 orang (11,11%) dan D3 sebanyak 2 orang (11,11%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Sumedang Selatan masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Sumedang Selatan.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	1	4	-	5
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-	2	-	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	2	-	1	-	3
5	Seksi Sosial	-	1	-	1	-	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	1	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	2	1	-	-	3
TOTAL		**-**	**6**	**2**	**8**	**2**	**18**

Sumber : Kecamatan Cimalaka Tahun 2022

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Cimalaka, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Kecamatan Cimalaka yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 9 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun

kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Cimalaka belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Cimalaka sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	7
3	Fungsional Tertentu	-
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	11
TOTAL		**18**

Sumber : Kecamatan Cimalaka Tahun 2022

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Cimalaka berjenis kelamin perempuan berjumlah 14 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 14 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	3	2	5
3	Seksi Tata Pemerintahan	1	2	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	3	3
5	Seksi Sosial	-	2	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	3	3
TOTAL		**4**	**14**	**18**

Sumber : Kecamatan Cimalaka Tahun 2022

2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Cimalaka bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbanyak berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah yang menduduki jabatan eselon III.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	1	1	**2**
2	Eselon IV	2	5	**7**
3	Non Eselon	1	8	**9**
TOTAL		**4**	**14**	**18**

Sumber : Kecamatan Cimalaka Tahun 2022

2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Cimalaka

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cimalaka. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Cimalaka memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Cimalaka. Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Cimalaka dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap mapun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Cimalaka

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	Rp. 14.969.930	V		
2.	Bangunan	Rp. 1.889.319.474,98	V		
3.	Kendaraan roda 4	2 Unit	2 Unit		
4.	Kendaraan roda 2	50 Unit	49 Unit	1 Unit	

Sumber : Kecamatan Cimalaka Tahun 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimalaka

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cimalaka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam tiga tahun. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimalaka
Kabupaten Sumedang

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian pada Tahun Ke-		
					1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				A	A	A						
2	Indeks Kepuasan Masyarakat				90.50	90.60	90.65						

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cimalaka
Kabupaten Sumedang

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-			Reaisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,248,341,805	3,554,675,985	3,746,171,499								
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	68,693,220	99,562,542	119,475,050								
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	425,176,990	467,694,689	608,003,096								
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20,000,000	22,000,000	28,600,000								
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	34,960,000	38,456,000	49,992,800								
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,938,400	78,032,240	134,221,157								

2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Cimalaka

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluangan yang dihadapi Kecamatan Cimalaka akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Cimalaka menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Cimalaka dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Cimalaka antara lain adalah :

2.4.1 Tantangan

A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksebilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Cimalaka.

Secara geografis, luas Kecamatan Cimalaka adalah 4.116 Ha, dengan ketinggian kurang lebih, 501 – 1000 mdpl.Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, iklim Kecamatan Cimalaka termasuk tipe B , dengan curah hujan 3.518 mm per tahun. Topografi Kecamatan Cimalaka, yang bertempratur rata–rata 29 C ini, adalah perbukitan, pegunungan, tanah darat, persawahan dan kolam, dimana unsur tanahnya didominasi oleh liat, pasir dan batuan vulkanik.

Secara administratif - eksternal, batas – batas wilayah Kecamatan Cimalaka, adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanjungkerta
- Sebelah Selatan : Kecamatan Cisarua
- Sebelah Barat : Kecamatan Sumedang Utara
- Sebelah Timur : Kecamatan Paseh

B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Cimalaka disangga oleh 14 desa, 42 dusun, 99 RW , 299 RT dan 21.788 KK. Jadi, rata – rata, setiap desa di Kecamatan Cimalaka menaungi sekitar 3 dusun; setiap dusun menaungi antara 2 sampai 3 RW; setiap RW menaungi 3 RT, dan ; setiap RT dihuni oleh sekitar 55 KK.

Jumlah Penduduk Kecamatan Cimalaka itu sendiri sampai Bulan Desember 2022, mencapai 63.100 orang, dengan klasifikasi gender : 31.254 orang perempuan dan 31.846 orang laki – laki .

2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (UU-Perda-Perbup yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya :

1. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
2. Peraturan Bupati Nomor 196 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
3. Peraturan Bupati Nomor 197 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan.

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 Ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10% dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleg Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Cimalaka tidak terlepas dari peran serta aparat Desa serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Cimalaka selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Cimalaka memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Cimalaka.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana pariwisata yang cukup mendukung.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi salah satu obyek unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

D. Lokasi Kecamatan Cimalaka yang menjadi potensi Kemajuan di Kecamatan Cimalaka.

Kecamatan Cimalaka yang cukup strategis yang berada dalam jalur jalan provinsi hal ini sangat mendukung memudahkan transfortasi para pelaku usaha baik dari luar daerah maupun dalam daerah untuk membuka peluang usaha dan berinvestasi di wilayah Kecamatan Cimalaka.

Oleh karena itu hal ini merupakan tantangan bagi Kecamatan Cimalaka untuk dapat mengembangkan dan memanfaatkan potensi- potensi yang ada.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN CIMALAKA

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Cimalaka sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Cimalaka, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Cimalaka periode 2024-2026. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cimalaka

Sebagaimana Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Cimalaka periode 2024-2026 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Cimalaka masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Cimalaka adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan
Tugas Pokok dan Fungsi

NO	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Urusan Administrasi Pemerintahan	Tersedianya LPPD dengan tepat waktu	Masih sulitnya pemenuhan data dari UPTD/UPTB untuk penyusunan LPPD	Perlunya penggunaan system informasi data LPPD yang terintegrasi
		`Persentase Desa Sadar Hukum	Masih rendahnya cakupan Desa yang masuk kategori wilayah sadar hukum	Peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa
		Persentase Perkara yang ditangani	Masih rendahnya SDM Aparatur yang berkompeten di bidang hukum dan advokasi	Peningkatan jumlah SDM dan kualitas SDM hukum
		Perda dan Perbup yang dihasilkan	Masih rendahnya kualitas produk hukum	Peningkatan penyuluhan kepada UPTD/UPTB terkait penyusunan regulasi daerah
		Meningkatnya nilai LAKIP daerah	Masih rendahnya kualitas SAKIP	Peningkatan bimbingan teknis dan pendampingan pengelola SAKIP

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Renstra Kecamatan Cimalaka mengacu pada RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 pada rentang waktu 3 (tiga) tahun, dimana Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran teknis RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang pemerintahan untuk jangka 3 (tiga) tahun. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Kabupaten Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten dan Renstra PD agar memperhatikan:

a. Penyelarasan Program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020–2024;
b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD Tahun 2018-2023 masing–masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2023;
c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2023 dalam pencapaian hasil (outcome);
d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
e. Kebijakan nasional;
f. Regulasi yang berlaku;
g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2026 memperhatikan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2038 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah Kabupaten Sumedang dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Cimalaka dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2018-2023, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Cimalaka tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Isu-Isu Strategis Kecamatan Cimalaka

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	**“BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT “**
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2024 - 2026, Kecamatan Cimalaka perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasaran nya antara lain Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Cimalaka. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cimalaka

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		
					2024	2025	2026
1	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90.50	90.60	90.65
			Persentase Desa dengan Nilai Sakip dengan Minimal Berkategori Baik	100	100	100	100
2	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30	30.25	30.50	30.75
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A

4.2 Cascading Kinerja Kecamatan Cimalaka

Gambar 1.4
Cascading Kinerja Kecamatan Cimalaka

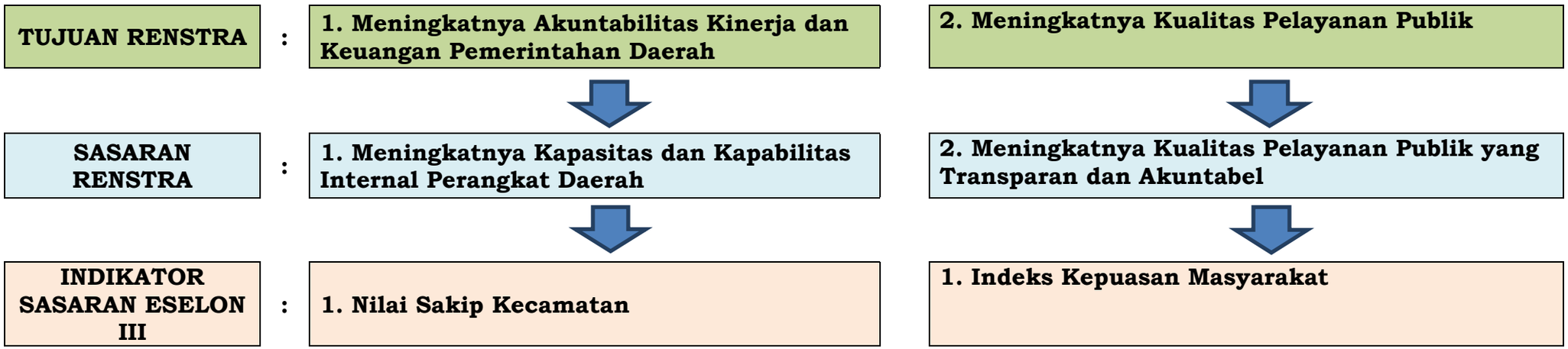

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Cimalaka. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Cimalaka harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Cimalaka periode 2024 - 2026 dirumuskan berdasakan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan mengunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Cimalaka dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	Peluang (O) : a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Cimalaka menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Cimalaka	**Tantangan (T):** a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksebilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Cimalaka b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan
Kekuatan (S): a. Adanya komitmen Pimpinanuntuk mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas	**Alternatif Strategi (S-O):** a. Meningkatkan kinerja pelayanan Pemerintahan melaui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	**Alternatif Strategi (S-T):** a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi

c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.		
Kelemahan (W): a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai	**Alternatif Strategi (W-O):** a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	**Alternatif Strategi (W-T):** a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan parasarana yang memadai

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan;
2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
3. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana dan strategi perbaikan kinerja secara menyeluruh pada periode berikutnya.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang adalah :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan puas;
b. Memperoleh unsur Pelayanan dengan peringkat tertinggi;
c. Memperoleh unsur Pelayanan dengan peringkat terendah.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	: Peningkatan Kualitas Pelayanan		
MISI	: Mewujudkan kualitas menajemen pemerintahan daerah yang semakin baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cimalaka sebagai SKPD yang melaksanaan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Tabel T-C.27./6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah				Nilai LPPD Kab.	3.4	3.65	3.76		3.78		3.80		3.80	
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah			Zona Integritas Perangkat Daerah	79.43	80	82		84		87		87	
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	3,248,341,805	A	3,554,675,985	A	3,746,171,499	A	10,549,189,288

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			KABUPATEN/KOTA											
		7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Laporan**	**6 Laporan**	**6 Laporan**	**70,239,510**	**6 Laporan**	**77,263,461**	**6 Laporan**	**92,716,153**	**6 Laporan**	**240,219,124**
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	3 Dokumen	13,948,550	4 Dokumen	15,343,405	3 Dokumen	18,412,086	3 Dokumen	47,704,041
			Penyusunan Renja, Perubahan Renja				2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen	
			Penyusunan Renstra						1 Dokumen					
			Penyusunan Profil Perangkat Daerah				1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	8,859,290	1 Dokumen	9,745,219	1 Dokumen	11,694,263	1 Dokumen	30,298,772
			Penyusunan RKA SKPD											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	1 Dokumen	1 Dokumen	5,901,940	1 Dokumen	6,492,134	1 Dokumen	7,790,561	1 Dokumen	20,184,635
			Penyusunan Perubahan RKA SKPD											
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3,647,160	1 Dokumen	4,011,876	1 Dokumen	4,814,251	1 Dokumen	12,473,287
			Penyusunan DPA SKPD											
		7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	1 Dokumen	1 Dokumen	4,694,360	1 Dokumen	5,163,796	1 Dokumen	6,196,555	1 Dokumen	16,054,711

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Penyusunan Perubahan DPA SKPD											
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	20 Laporan	25 Laporan	33,188,210	25 Laporan	36,507,031	25 Laporan	43,808,437	25 Laporan	113,503,678
			LKIP				2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	
			LKPJ				1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			LPPD				2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	
			SKM				2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan	
			SPIP				1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
			SIEVK				4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan	
			SIMEP				12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan	
			RB ZI				1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2 Laporan**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**2,611,373,235**	**3 Laporan**	**2,612,790,717**	**3 Laporan**	**2,615,909,177**	**3 Laporan**	**7,840,073,129**
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/Bulan	18 Orang/Bulan	18 Orang/Bulan	2,597,198,415	18 Orang/Bulan	2,597,198,415	18 Orang/Bulan	2,597,198,415	18 Orang/Bulan	7,791,595,244
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	12 Dokumen	12 Dokumen	4,069,230	12 Dokumen	4,476,153	12 Dokumen	5,371,384	12 Dokumen	13,916,767
			Penatausahaan (Verifikasi Pengajuan Pencairan dan SPJ)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10,105,590	12 Laporan	11,116,149	12 Laporan	13,339,379	12 Laporan	34,561,118

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			an/Semesteran SKPD	dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD										
			Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD/Akhir Tahun SKPD											
			Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan											
		7.01.01. 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**0**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**3,000,0 00**	**2 Laporan**	**9,519,8 41**	**2 Laporan**	**11,423, 809**	**2 Laporan**	**23,943,6 50**
		7.01.01. 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	1 Dokume n	1 Dokume n	3,000,0 00	1 Dokume n	3,300,0 00	1 Dokumen	3,960,0 00	1 Dokumen	10,260,0 00
			Penyusunan RKBMD, RKPBMD											
		7.01.01. 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	12 Laporan		-	12 Laporan	6,219,8 41	12 Laporan	7,463,8 09	12 Laporan	13,683,6 50

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Penatausahaan Barang Milik Daerah (Rekonsilitasi dan Inventarisasi Aset)											
		7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**25,000,000**	**4 Laporan**	**82,500,000**	**4 Laporan**	**99,000,000**	**4 Laporan**	**206,500,000**
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	35 Paket	35 Paket	15,000,000	35 Paket	16,500,000	35 Paket	19,800,000	35 Paket	51,300,000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, dan Sejenisnya											
		7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	12 Dokumen	5,500,000	12 Dokumen	6,600,000	12 Dokumen	17,100,000
			Pengelolaan Data Kepegawaian											
		7.01.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0	0	4 Orang	5,000,000	2 Orang	5,500,000	2 Orang	6,600,000	2 Orang	17,100,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pembelian Cinderamata											
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	35 Orang		-	35 Orang	55,000,000	35 Orang	66,000,000	35 Orang	121,000,000
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah (Bimtek)											
		7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Laporan**	**5 Laporan**	**7 Laporan**	**65,445,330**	**7 Laporan**	**86,989,863**	**7 Laporan**	**104,387,836**	**7 Laporan**	**256,823,029**
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	40,000,000	2 Paket	44,000,000	2 Paket	52,800,000	2 Paket	136,800,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Barang-Barang Habis Pakai dan Tidak Perlu Pemeliharaan (ATK, Materai, Alat-alat Listrik, dan sejenisnya)											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket		-	2 Paket	5,000,000	2 Paket	6,000,000	2 Paket	11,000,000
			Penyediaan peralatan rumah tangga (Thermogun, handsanitizer, sabun cuci tangan, desinfektan, masker, Tisue, Wastafel Fortable, Faceshield, peralatan kebersihan, dan sejenisnya)											
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	5,000,000	2 Paket	5,500,000	2 Paket	6,600,000	2 Paket	17,100,000
			Penyediaan Mamin, Air Galon, Makanan Khas, dan sejenisnya											
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5,445,330	1 Paket	5,989,863	1 Paket	7,187,836	1 Paket	18,623,029
			Penyediaan Cetak dan penggandaan (Cetak Buku, Cetak Photo, ID											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Card, Photocpy, dan sejenisnya)											
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	5,000,000	8 Dokumen	5,500,000	8 Dokumen	6,600,000	8 Dokumen	17,100,000
			Pembelian surat kabar, buku, dan sejenisnya											
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	0	12 Laporan	5,000,000	12 Laporan	5,500,000	12 Laporan	6,600,000	12 Laporan	17,100,000
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi (Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Daerah)											
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,500,000	1 Dokumen	6,600,000	1 Dokumen	17,100,000
			Penatausahaan Arsip (Pencatatan, dan sejenisnya)											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	0	0	-	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	22,000,000
			Dukungan Happy Digital Region (Mini Command Center, dan sejenisnya)											
		7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**4 Laporan**	**70,000,000**	**2 Laporan**	**132,000,000**	**4 Laporan**	**158,400,000**	**4 Laporan**	**360,400,000**
		7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	0	0	-	4 Unit	55,000,000	4 Unit	66,000,000	4 Unit	121,000,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			dan 4 Untuk Ess II s.d Staf											
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	3 Unit	15,000,000	4 Unit	16,500,000	4 Unit	19,800,000	4 Unit	51,300,000
			Pengadaan Mebel (Meja, Kursi, Lemari, dan Sejenisnya)											
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	6 Unit	6 Unit	30,000,000	6 Unit	33,000,000	6 Unit	39,600,000	6 Unit	102,600,000
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Komputer, Laptop, Printer, AC, Drone, Kamera dan sejenisnya)											
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1 Unit	1 Unit	25,000,000	1 Unit	27,500,000	1 Unit	33,000,000	1 Unit	85,500,000
			Pembangunan Mushola, Garasi, Gazebo, Kolam, Pagar Kantor, TPT Kantor, Ruang											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Rapat, Partisi, Toilet, Penataan Halaman, dan sejenisnya											
		7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**3 Laporan**	**350,283,730**	**3 Laporan**	**385,312,103**	**3 Laporan**	**462,374,524**	**3 Laporan**	**1,197,970,357**
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	15,833,730	12 Laporan	17,417,103	12 Laporan	20,900,524	12 Laporan	54,151,357
			Pembayaran langganan air, telpon, listrik, internet											
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,500,000	1 Laporan	6,600,000	1 Laporan	17,100,000
			Sewa Meja, Kursi, Panggung, LED, Drone, Infocus, Stand Pamaeran, dan sejenisnya											
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	329,450,000	12 Laporan	362,395,000	12 Laporan	434,874,000	12 Laporan	1,126,719,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kantor yang Disediakan										
			Honorarium Operator, Jasa Kebersihan, Jasa Pengamanan, Jasa Pengemudi, Instruktur Senam, Honor Ustad (Taklim Aparatur) dan sejenisnya											
		7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**5 Laporan**	**53,000,000**	**5 Laporan**	**168,300,000**	**5 Laporan**	**201,960,000**	**5 Laporan**	**423,260,000**
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	13 Unit	14 Unit	30,000,000	15 Unit	33,000,000	16 Unit	39,600,000	16 Unit	102,600,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, pembayaran STNK (Kendaraan Roda 2 dan 4 untuk Ess 2 s.d Staf)											
		7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	-	6 Unit	5,000,000	7 Unit	5,500,000	8 Unit	6,600,000	8 Unit	17,100,000
			Jasa service perbaikan kursi, meja, lemari dan sejenisnya											
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	7 Unit	3,000,000	8 Unit	3,300,000	9 Unit	3,960,000	9 Unit	10,260,000
			Jasa Service Komputer, Laptop, Printer, AC, Drone, Kamera dan sejenisnya											
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit		-	1 Unit	110,000,000	1 Unit	132,000,000	1 Unit	242,000,000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Rehab Gedung Kantor, Jasa Pemeliharaan Rumah Jabatan, Rumah Dinas, Gedung Kantor, dan sejenisnya											
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1 Unit	1 Unit	15,000,000	1 Unit	16,500,000	1 Unit	19,800,000	1 Unit	51,300,000
			Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Mushola, Garasi, Gazebo, Kolam, Pagar Kantor, TPT, Ruang Rapat, Partisi, Toilet, dan sejenisnya)											
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				**Indeks Pelayanan Publik**	4.66	4.70	4.71		4.72		4.75		4.75	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel			**Indeks Kepuasan Masyarakat**	85.57	90.00	90.50		90.60		90.75		90.75	
		7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Masyarakat yang diberikan Layanan**	**100%**	**100%**	**100%**	**68,693,220**	**100%**	**99,562,542**	**100%**	**119,475,050**	**100%**	**287,730,812**
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**2 Laporan**	**1 Laporan**	**2 Laporan**	**16,313,800**	**2 Laporan**	**17,945,180**	**2 Laporan**	**21,534,216**	**2 Laporan**	**55,793,196**
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8,313,800	1 Laporan	9,145,180	1 Laporan	10,974,216	1 Laporan	28,433,196

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Instansi Vertikal Terkait	Instansi Vertikal Terkait										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Rapat Koordinasi pemerintahan/ Rapat Minggon											
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	8,800,000	1 Dokumen	10,560,000	1 Dokumen	27,360,000
			Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan tingkat Kecamatan											
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**47,379,420**	**1 Laporan**	**52,117,362**	**1 Laporan**	**62,540,834**	**1 Laporan**	**162,037,616**
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	47,379,420	3 Laporan	52,117,362	3 Laporan	62,540,834	3 Laporan	162,037,616

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										
			Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)											
			Pelayanan Administrasi Pertanahan (PPAT)											
			Pelayanan Administrasi (kependudukan dll)											
		7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**5,000,000**	**3 Laporan**	**29,500,000**	**3 Laporan**	**35,400,000**	**3 Laporan**	**69,900,000**
		7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	9 Jenis Pelayanan	-	9 Jenis Pelayanan	5,000,000	1 Laporan	5,500,000	1 Laporan	6,600,000	1 Laporan	17,100,000
			Pelayanan Publik Perizinan (rekomendasi teknis) yang											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			dilimpahkan kepada Camat											
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	-	-		-	1 Laporan	12,000,000	1 Laporan	14,400,000	1 Laporan	26,400,000
			Pelayanan Publik Non Perizinan (rekomendasi teknis) yang dilimpahkan kepada Camat											
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	-		-	1 Laporan	12,000,000	1 Laporan	14,400,000	1 Laporan	26,400,000
			Urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat											
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**71.43%**	**80.36%**	**84.82%**	**425,176,990**	**89.29%**	**467,694,689**	**100%**	**608,003,096**	**100%**	**1,500,874,775**
		7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan**	**Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan**	**0**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**25,000,000**	**1 Laporan**	**27,500,000**	**1 Laporan**	**35,750,000**	**1 Laporan**	**88,250,000**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pemberdayaan Desa	**Pemberdayaan Desa**										
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	3 Lembaga Kemasyarakatan	27,500,000	3 Lembaga Kemasyarakatan	35,750,000	3 Lembaga Kemasyarakatan	88,250,000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Penyelenggaraan Musrenbang Desa											
			Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan											
			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan											
		7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**3 Laporan**	**400,176,990**	**3 Laporan**	**440,194,689**	**3 Laporan**	**572,253,096**	**3 Laporan**	**1,412,624,775**
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	340,776,990	3 Lembaga Kemasyarakatan	374,854,689	3 Lembaga Kemasyarakatan	487,311,096	3 Lembaga Kemasyarakatan	1,202,942,775

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an											
			Peringatan Hari-Hari Besar											
			Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (Blm)											
			Pemberdayaan Keluarga											
			Rantang Simpati											
			Penyuluhan Dan Penanggulangan Penyakit Sosial											
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	29,700,000	3 Lembaga Kemasyarakatan	32,670,000	3 Lembaga Kemasyarakatan	42,471,000	3 Lembaga Kemasyarakatan	104,841,000
			Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)											
			Pembinaan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah											
			Pembinaan Kepemudaan Dan Olahraga											
			Pembinaan LPM											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	29,700,000	3 Laporan	32,670,000	3 Laporan	42,471,000	3 Laporan	104,841,000
			Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah											
			Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (Bbgrm)											
			Pembinaan Bumdes											
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan**	**100%**	**100%**	**100%**	**20,000,000**	**100%**	**22,000,000**	**100%**	**28,600,000**	**100%**	**70,600,000**
		7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**20,000,000**	**1 Laporan**	**22,000,000**	**1 Laporan**	**28,600,000**	**1 Laporan**	**70,600,000**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	22,000,000	1 Laporan	28,600,000	1 Laporan	70,600,000
			Pembinaan dan fasilitasi Linmas											
			fasilitasi Kebencanaan (koordinasi kejadian bencana, fasilitasi satlak bencana)											
			Monitoring pengendalian gangguan kamtibmas											
			Pencegahan Covid 19											
			Evaluasi AKB											
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Masalah/Pengaduan/Konflik sosial yang ditangani**	**100%**	**100%**	**100%**	**34,960,000**	**100%**	**38,456,000**	**100%**	**49,992,800**	**100%**	**123,408,800**
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**2 Laporan**	**34,960,000**	**2 Laporan**	**38,456,000**	**2 Laporan**	**49,992,800**	**2 Laporan**	**123,408,800**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Penugasan Kepala Daerah	**Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**										
		7.01.05.2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila			3 Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000	3 Lembaga Kemasyarakatan	22,000,000		28,600,000	3 Lembaga Kemasyarakatan	70,600,000
			Monitoring Pemilihan Umum											
			Monitoring Pilkada/Pilpres/Pileg											
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14,960,000	1 Dokumen	16,456,000	1 Dokumen	21,392,800	1 Dokumen	52,808,800
			Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan											
		7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa dengan Nilai SAKIP DESA minimal Berkategori Baik**	**21.43%**	**42.86%**	**57.14%**	**75,938,400**	**71.43%**	**78,032,240**	**100%**	**134,221,157**	**100%**	**288,191,797**
		7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi**	**Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan**	**1 Laporan**	**3 Laporan**	**6 Laporan**	**75,938,400**	**5 Laporan**	**78,032,240**	**6 Laporan**	**134,221,157**	**6 Laporan**	**288,191,797**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**										
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	2 Dokumen	22,000,000	2 Dokumen	28,600,000	2 Dokumen	70,600,000
			Pembinaan Administrasi/aparatur Pemerintahan Desa											
			Penyelenggaraan Lomba Desa											
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0	2 Dokumen	2 Dokumen	3,742,970	2 Dokumen	4,117,267	2 Dokumen	5,352,447	2 Dokumen	13,212,684
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa											
			Monitoring Dan Evaluasi Rapbdes Dan Rpapbdes											

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0	0	1 Dokumen	25,000,000	0	-	1 Dokumen	32,500,000	1 Dokumen	57,500,000
			Fasilitasi/Monitoring Pilkades											
		7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0	0	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	22,000,000	1 Dokumen	28,600,000	1 Dokumen	70,600,000
			Pembinaan BPD											
		7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	0	0		-	1 Dokumen	22,000,000	1 Dokumen	28,600,000	1 Dokumen	50,600,000
			Pembinaan RT/RW											
		7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	0	0	1 Laporan	7,195,430	1 Laporan	7,914,973	1 Laporan	10,568,710	1 Laporan	25,679,113

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Pembinaan dan Evaluasi SAKIP Desa											
JUMLAH								**3,873,110,415**		**4,260,421,456**		**4,686,463,602**		**12,819,995,473**

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Bidang Urusan Kecamatan Cimalaka

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90.50	90.60	90.65	90.65

BAB VIII
PENUTUP

Rencana strategis Kecamatan Cimalaka Tahun 2024-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja tahunan selama periode rencana strategis. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Cimalaka dalam mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang 2024-2026. rencana strategis Kecamatan Cimalaka merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru.

Dengan adanya rencana strategis ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Cimalaka diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Cimalaka selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Cimalaka dalam rencana strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh Komitmen yang kuat, Konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan Cimalaka, peran serta masyarakat serta tata Pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si.
NIP. 19691015 199003 1 004